

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP
PEROLEHAN OPINI AUDIT BPK TAHUN 2021 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Nadya Prameswari
NPP. 29.0831

*Asal Pendaftaran Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Keuangan Publik*

Email: nadyaprameswari0608@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP) : With the enactment of new rules for regional government financial reports for the 2021 fiscal year, namely PP No. 12 of 2019 jo. Permendagri No. 77 of 2020, and the application of an integrated Regional Government Information System (SIPD) in all Regional Governments in Indonesia, as well as the acquisition of the Purbalingga Regency WTP opinion for 5 consecutive years from 2016-2020. **Purpose** : This study aims to determine and analyze the effect of the implementation of SIPD which has just been implemented throughout Indonesia starting in 2021 and the quality of LKPD with the latest regulations on the 2021 BPK Audit Opinion Gain in Purbalingga Regency. **Methods**: This research method is descriptive quantitative. Data collection techniques using a questionnaire. Respondents in this study amounted to 68 people with purposive random sampling technique. Data analysis model using multiple linear regression. The data obtained were processed and analyzed using SPSS statistical data processing software Version 20. **Results**: The application of SIPD affects the BPK Audit Opinion Gain in Purbalingga Regency, LKPD Quality affects the BPK Audit Opinion Gain in Purbalingga Regency, SIPD Implementation and LKPD Quality simultaneously have a positive and significant effect on the dependent variable, namely BPK Audit Opinion Gain. **Conclusion**: From the results of the study, it can be concluded that the application of SIPD has a positive and significant effect on the BPK's Audit Opinion. The quality of LKPD has a positive and significant effect on BPK's Audit Opinion Gain. The application of SIPD and LKPD quality together have an effect on BPK's Audit Opinion Gain.

Keywords: BPK opinion, LKPD, SIPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Dengan di berlakukannya aturan baru untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 yaitu PP No.12 Tahun 2019 jo. Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara terintegrasi di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, serta perolehan opini WTP Kabupaten Purbalingga 5 tahun berturut-turut dari 2016-2020. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh dari Penerapan SIPD yang baru saja diterapkan diseluruh Indonesia mulai Tahun 2021 dan

Kualitas LKPD dengan adanya regulasi terbaru terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga. **Metode** : Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 68 orang dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Random Sampling*. Model analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Software* pengolah data statistik SPSS Versi 20. **Hasil** : Penerapan SIPD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Purbalingga, Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Purbalingga, Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni Perolehan Opini Audit BPK. **Kesimpulan** : Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perolehan Opini Audit BPK.

Kata Kunci : LKPD, Opini BPK, SIPD

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai pengelola dana wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip *accurate, relevance, timeliness* dan *trusted* untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dari laporan keuangan pada suatu pemerintahan daerah yaitu kualitas dari manusia itu sendiri, penggunaan sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan kontrol yang dilakukan dari dalam sebuah organisasi. Menurut Moenek dan Suwanda (2019:128) Informasi Laporan keuangan yang berkualitas wajib memenuhi beberapa syarat yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah dirancang dengan maksud sebagai alat untuk memberikan informasi dan akuntabilitas atas dana yang diterima dan dana yang digunakan. Hal ini dituangkan dalam Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Perubahan yang terjadi pada peraturan ini jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yakni terkait dengan nomenklatur belanja, nomenklatur pendapatan dan nomenklatur belanja dan pendapatan. Perubahan dalam hal penatausahaan ini mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan inovasi untuk segera menyesuaikan kembali dengan aturan yang baru.

Terkait dengan pengembangan inovasi, dalam rangka menjawab persoalan tentang perubahan yang terjadi pada aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang nantinya akan dipublikasikan seperti yang dijelaskan pada Pasal 214 ayat 1 PP No.12 Tahun 2019. maka Kementerian Dalam Negeri mengatur sebuah sistem yang terhubung dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan kini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebuah informasi yang berkualitas wajib melangsungkan beberapa aspek atau kriteria yang dijelaskan menurut Jogiyanto dalam buku Konsep Sistem Informasi karya Prehanto (2020:5) yaitu akurat (*accurate*), tepat waktu (*timeliness*), dan relevan (*Relevance*). SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan software masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang pada 2021 ini mulai mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan aplikasi lokal yaitu SIMRAL, SIPD ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Atas dasar laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh predikat WTP dalam 5 tahun terakhir sebelum penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Tabel 1
Tabel Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

No.	Tahun Anggaran	Perolehan Opini
1.	2016	WTP
2.	2017	WTP
3.	2018	WTP
4.	2019	WTP
5.	2020	WTP

Sumber : Data dari BPK 2016-2020 diolah oleh Penulis

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh di Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran 2021 dan kualitas laporan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan nomenklatur serta struktur baru seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mampu membawa Kabupaten Purbalingga mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK ataukah justru mengalami penurunan dari kualitas laporan yang dihasilkan. Apabila penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan maksimal sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 oleh seluruh perangkat daerah tentu akan berpengaruh kepada pemberian Opini oleh BPK dan dapat mempertahankan Opini WTP seperti 5 tahun sebelumnya. Begitu juga laporan keuangan daerah yang berkualitas dan selaras dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK tentu juga akan mempengaruhi terhadap pemberian Opini BPK.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga yakni SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan software masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D. Selain itu, dengan di berlakukannya regulasi yang baru memberikan tantangan baru untuk pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum diterapkan seluruh aturan baru ini, dari tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memperoleh opini WTP dari BPK-RI, hal ini menjadi pertanyaan besar apakah setelah diberlakukannya aturan baru ini terkait SIPD dan LKPD ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan tetap mempertahankan perolehan opini BPK atau justru akan mengalami penurunan dari segi kualitasnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan SIPD, Kualitas LKPD, dan Perolehan Opini Audit BPK. Penelitian Zifi dan Ali (2019) berjudul Pengaruh Opini Audit terhadap Opini BPK pada lembaga Tahun 2015-2017, menemukan bahwa opini audit sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit lembaga tahun 2015-2017. Penelitian Andi Nur Asiah (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan SPIP terhadap Nilai Pelaporan di Kabupaten Gowa, menemukan bahwa Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Pelaporan keuangan. Penelitian Balqis dan Fadly (2021) dengan judul efektivitas penerapan SIPD di DISTRANAKER Kabupaten Aceh, menemukan bahwa Penerapan SIPD sudah Efektif, mudah dan cepat namun masih butuh pegawai. Penelitian Naomi Ikko (2020) yang berjudul Pengaruh SPI, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Pelatihan dan SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, menemukan bahwa SPI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, kualitas pelatihan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, kualitas SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, SPI, SAP, Kualitas pelatihan dan kualitas SDM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penelitian oleh Yuswardi (2017) yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Pemanfaatan SIPKD, Kompetensi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas LKPD pada SKPD Kabupaten Bireuen dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating, menemukan bahwa simultan pelatihan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, pelatihan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi hubungan antara pelatihan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian sebelumnya yakni dari topik yang hampir sama seperti pengaruh dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan dan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri serta Perolehan Opini Audit BPK. Perbedaan yang sangat terlihat dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi tempat atau lokasi dan waktu penelitian yang digunakan yakni berada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada tahun 2021. Selain itu, variabel terikat pada penelitian ini yaitu perolehan Opini Audit BPK yang akan diperoleh oleh Kabupaten Purbalingga di Tahun Anggaran 2021.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Perolehan Opini Audit BPK tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, dan pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Perolehan Opini Audit BPK tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, serta menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara bersamaan terhadap Perolehan Opini Audit BPK tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan Metode kuantitatif deskriptif serta inferensial (meramalkan). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 68 orang dengan teknik pengambilan sampel Purposive Random Sampling. Model analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan Software pengolah data statistik SPSS Versi 20.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan atau mendistribusikan kuesioner (angket) ke 17 OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dengan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur lain, dan website milik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber-sumber bacaan lain terkait dengan topik yang penulis bahas. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi yang merupakan data dari sumber non-manusia atau dokumen-dokumen atau foto pendukung.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan SPSS Versi 20. Untuk mengetahui keterkaitan antara satu Y dengan dua atau lebih X. Dengan persamaan sebagai berikut:

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

3.1 Deskriptif Data Penelitian

Data deskriptif merupakan penggambaran data seperti nilai *max*, *min*, *mean* dan std. deviasi dari data yang diteliti. Pada tabel dibawah ini menunjukkan statistik deskriptif dari tiap-tiap variabel penelitian.

Tabel 2
Deskriptif Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	68	38	50	44,82	2,485
X2	68	30	40	32,91	2,170
Y	68	87	110	96,76	3,686
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Atas dasar tabel 2 menunjukkan keseluruhan data yang diuji adalah 68 data yang tiap-tiap dari variabel itu memiliki nilainya yang bervariasi.

- 1) Penerapan SIPD (X1), untuk tahun 2021 memiliki nilai terkecil yaitu 38 dan nilai terbesar 50. Nilai mean/rata-rata Penerapan SIPD (X1) 44,82 dengan nilai std. deviasi yaitu 2,485.
- 2) Kualitas LKPD (X2), untuk tahun 2021 memiliki nilai terkecil 30 dan terbesar 40. Nilai mean/rata-rata Kualitas LKPD (X2) 32,91 dengan nilai std. deviasi yaitu 2,170.
- 3) Opini Audit BPK Tahun 2021 (Y), untuk tahun 2021 memiliki nilai terkecil 87 dan nilai terbesar 110. Nilai mean/rata-rata Opini Audit BPK Tahun 2021 (Y) 96,76 dengan nilai standar deviasi yaitu 3,686.

3.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner Penelitian ini didistribusikan kepada 17 OPD di Kabupaten Purbalingga dengan Responden yaitu Seluruh Kepala, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, dan Kasubag Keuangan yang berjumlah 68 orang yang kemudian diuraikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

No.	Uraian	OPD	Sebar	Kembali		Tidak Kembali
				Rusak	Baik	
1.	Dinas	9	36	0	36	0
2.	Badan	2	8	0	8	0

3.	Kantor	1	4	0	4	0
4.	Kecamatan	4	16	0	16	0
5.	Satpol PP	1	4	0	4	0
	Jumlah	17	68	0	68	0

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

3.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang terdapat dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan Jabatan, Lama kerja dan disiplin ilmu responden. Karakteristik responden yang didapatkan dari kuesioner yang dibagikan dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
I. Jabatan			
1.	Kepala Badan/ Dinas/ Kantor	17	25,0
2.	Sekretaris Badan/ Dinas/ Kantor	17	25,0
3.	Kasubag Perencanaan	17	25,0
4.	Kasubag Keuangan	17	25,0
	Total	68	100,0
II. Lama Kerja per Tahun			
1.	1-5	0	00,0
2.	6-10	9	13,2
3.	>10	59	86,8
	Total	68	100,0
III. Disiplin Ilmu			
1.	Akuntansi	23	33,8
2.	Lainnya	45	66,2
	Total	68	100,0

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh gambaran atas karakteristik dari responden pada OPD di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 17 Kepala Badan/Dinas/Kantor, 17 Sekretaris, 17 Kasubag Perencanaan, dan 17 Kasubag Keuangan, dengan lama kerja 6-10 tahun berjumlah 9

orang, dan lebih dari 10 tahun berjumlah 59 orang serta yang belatar pendidikan akuntansi berjumlah 23 orang dan 45 orang belatar belakang pendidikan lainnya.

3.4 Uji Kualitas Data

Dalam uji kualitas data, dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Uji Validitas Data

Uji Validitas data dilakukan dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Suatu item dinyatakan valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item dengan taraf signifikansi dibawah 0,05 (5%). Artinya jika nilai $r_{hitung} >$ dari nilai r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dalam melakukan uji validitas data pada setiap item pertanyaan, peneliti mengambil 10 sampel diluar dari responden utama, sehingga dapat diperoleh nilai signifikansi untuk 5% adalah 0,632 (valid).

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Instrumen Pertanyaan

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penerapan SIPD (X1)	1	0,918	0,632	✓
	2	0,938		✓
	3	0,948		✓
	4	0,852		✓
	5	0,852		✓
	6	0,798		✓
	7	0,806		✓
	8	0,938		✓
	9	0,883		✓
	10	0,832		✓
	11	0,883		✓
Kualitas LKPD (X2)	1	0,727	0,632	✓
	2	0,717		✓
	3	0,868		✓
	4	0,717		✓
	5	0,868		✓
	6	0,777		✓
	7	0,897		✓
	8	0,926		✓
	1	0,799	0,632	✓

Perolehan Opini Audit BPK (Y)	2	0,875	✓
	3	0,702	✓
	4	0,799	✓
	5	0,702	✓
	6	0,799	✓
	7	0,775	✓
	8	0,941	✓
	9	0,834	✓
	10	0,941	✓
	11	0,941	✓
	12	0,941	✓
	13	0,809	✓
	14	0,875	✓
	15	0,834	✓
	16	0,757	✓
	17	0,757	✓
	18	0,757	✓
	19	0,757	✓
	20	0,736	✓
	21	0,707	✓
	22	0,861	✓
	23	0,840	✓
	24	0,840	✓

* tanda ✓ memiliki arti Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa rhitung (*corrected item total correlation*) dari setiap pertanyaan > dari $\alpha = 5\%$ yaitu 0,632. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pertanyaan pada penerapan SIPD, Kualitas LKPD dan Perolehan Opini Audit BPK adalah valid dan dapat menjabarkan setiap variabelnya.

2) Uji Reliabilitas Data

Suatu variabel dikatakan reliabel menurut Ghazali (2016) yakni jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Sehingga hasil uji instrumen pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pertanyaan

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ambang Batas	Keterangan
Penerapan SIPD (X1)	0,964		✓
Kualitas LKPD (X2)	0,927	0,700	✓
Perolehan Opini Audit BPK (Y)	0,976		✓

* tanda ✓ memiliki arti reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

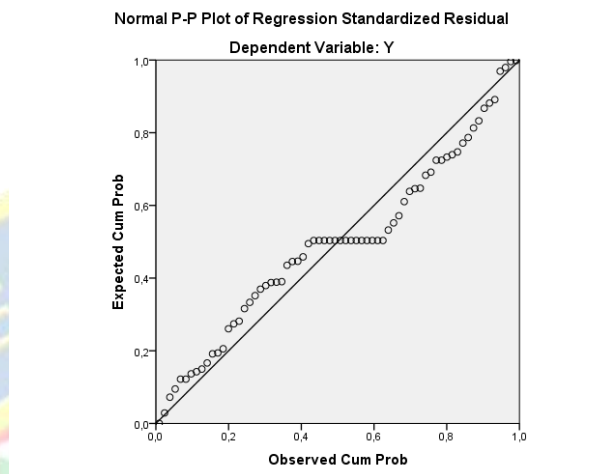
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada tiap-tiap variabel berada diatas ambang batas yaitu 0,700 atau *Cronbach's Alpha* > 0,700. Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel, yang artinya konsisten jika nantinya akan digunakan dan dimodifikasi oleh peneliti lain.

3.5 Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa Uji normalitas memiliki tujuan untuk memeriksa model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak dengan menggunakan analisis grafik dan statistik. Analisis grafik yang dilakukan dengan melihat tampilan dari grafik histogram, ketentuannya yaitu jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisnya maka pola berdistribusi normal. Selain itu, analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov Smirnov*, dengan syarat jika diambil dari pendapat Ghozali (2016) yakni apabila *Asymp.Sig (2-tailed) > α*, dimana α sebesar 0,05, maka variabel residual dapat dipastikan berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil analisis dibawah ini :

1) Analisis Grafik



Gambar 1 Grafik Normal Plot

berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa penyebaran pola atau bulatan-bulatan kecil tidak jauh dari garis diagonal yang membentang selaras dengan penjelasan oleh Gozali (2011:161) yang menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Hasil Analisis grafik diatas akan diperkuat dan diperjelas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,35527056
	Absolute	,129
Most Extreme Differences	Positive	,129
	Negative	-,088
Kolmogorov-Smirnov Z		1,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,209

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *asymp.sig (2-tailed)* $0,209 > 0,05$ dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang terjadi antar variabel independen. Model regresi yang baik, jika tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghazali (2013), Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai toleransi dan VIF yaitu apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Penerapan SIPD (X1)	,998	1,002
Kualitas LKPD (X2)	,998	1,002

a. Dependent Variable: Perolehan Opini Audit BPK (Y)

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

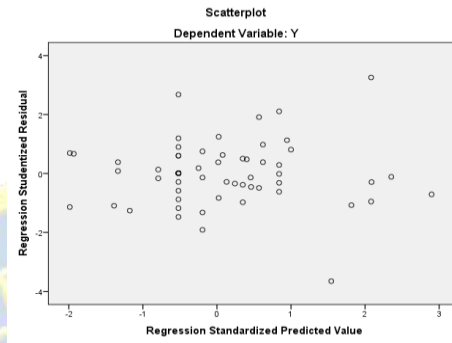
Dilihat dari tabel diatas, nilai toleransi pada setiap variabel adalah 0,998 atau diatas 0,10 dan nilai VIFnya adalah 1,002 atau dibawah 10. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi penelitian ini.

3) Hasil Uji Heteroskedasitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari residual satu dan yang lain. Jika residual tetap, maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda dapat disebut sebagai heteroskedasitas. Menurut Ghazali (2016) model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedasitas atau dengan kata lain model regresinya terjadi homoskedasitas. Pada penelitian ini, digunakan dua cara untuk menganalisisnya yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

1) Analisis Grafik

Uji heteroskedasitas yang dilakukan menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas. Hal ini dapat dilihat dari gambar 2 dibawah ini, grafik menunjukkan dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu seperti gelombang dan melebar kemudian menyempit, seperti yang dijelaskan oleh Ghazali (2016).



Gambar 2 Grafik Scatterplot

2) Analisis statistik

Analisis statistik dalam uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser, dasarnya jika nilai sig < 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-10,511	6,866		-1,531	,131
1 Penerapan SIPD	,102	,120	,103	,854	,396
Kualitas LKPD	,248	,137	,217	1,806	,075

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,396 dan 0,075 yang berarti masing-masing variabel independent tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

3.6 Uji Hipotesis

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) atau *adjusted R²* yang intinya dilakukan dengan tujuan untuk menghitung kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nilai

R^2 berada diantara nol dan satu. Hasil pengukuran dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 10 Sebagai berikut :

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,799^a	,639	,628	1,16502

a. Predictors: (Constant), Kualitas LKPD, Penerapan SIPD

b. Dependent Variable: Perolehan Opini Audit

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (diolah)

Dari hasil diatas diketahui nilai *R Square* (R^2) sebesar 63,9%, namun pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah lebih dari satu. Sehingga, untuk melihat kemampuan variabel dalam memprediksi variabel dependen lebih dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R*. Nilai *adjusted R²* pada penelitian ini sebesar 0,628 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 62,8% atau dapat dikatakan 62,8% perubahan atas variabel Perolehan Opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD sedangkan sisanya 37,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

2) Hasil Uji F (F-Test)

Tabel 7 Hasil Uji F (F-Test)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155,960	2	77,980	57,453	,000^b
	Residual	88,223	65	1,357		
	Total	244,183	67			

a. Dependent Variable: Perolehan Opini Audit BPK

b. Predictors: (Constant), Kualitas LKPD, Penerapan SIPD

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (diolah)

Hasil diatas menjelaskan bahwa uji F, nilai F_{hitung} (57,453) > F_{tabel} (3,15) dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti kedua variabel independen yang terdiri dari Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni Perolehan Opini Audit BPK.

3) Hasil Uji t (t-Test)

Tabel 8 Hasil Uji T (*t-test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	61,829	3,282		18,838	,000
1 Penerapan SIPD	,415	,057	,540	7,239	,000
Kualitas LKPD	,496	,066	,564	7,558	,000

a. Dependent Variable: Perolehan Opini Audit BPK

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (diolah)

Dari tabel 12 Diatas hasil uji t (*t-test*) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK pada Kabupaten Purbalingga, dimana nilai $t_{hitung} (7,239) > t_{tabel} (1,997)$ dan sig pada $0,000 < 0,05$.

Sehingga, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, yang artinya jika terjadi kenaikan 1 poin dalam penerapan SIPD maka kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP akan bertambah sebanyak 0,415 poin.

Semakin baik tanggapan responden atas penerapan SIPD maka akan semakin besar kemungkinan Kabupaten Purbalingga mendapatkan Opini Audit BPK dengan Predikat WTP atau Predikat Terbaik dalam pengelolaan keuangan.

2. Variabel Kualitas LKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan opini audit BPK di Kabupaten Purbalingga, dimana nilai $t_{hitung} (7,558) > t_{tabel} (1,997)$ dan sig pada $0,000 < 0,05$.

Sehingga, H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, yang artinya jika terjadi peningkatan sebesar 1 poin atas Kualitas LKPD kemungkinan mendapatkan opini audit BPK dengan Predikat WTP bertambah sebesar 0,496 poin.

Semakin baik tanggapan responden atas Kualitas LKPD maka akan semakin besar kemungkinan Kabupaten Purbalingga mendapatkan Opini Audit BPK dengan Predikat WTP atau Predikat Terbaik dalam pengelolaan keuangan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hal-hal yang sangat diperhatikan sekarang ini, terlebih lagi kini seluruh pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh maupun mempertahankan perolehan opini WTP yang diberikan tiap tahunnya oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan kedepannya. Penulis menemukan temuan penting yakni dimana penerapan SIPD dan kualitas dari LKPD memiliki pengaruh yang cukup besar yaitu sebesar 62,8% dapat mempengaruhi Opini BPK, sehingga dapat dikatakan apabila penerapan SIPD yang dilakukan di pemerintah daerah berjalan lancar dan tepat guna, dan kualitas dari laporan keuangan yang semakin baik akan membuat kemungkinan pemerintah daerah mendapatkan Opini WTP akan semakin besar. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan Opini WTP ke-6 kalinya dari BPK setelah menggunakan SIPD meski masih terjadi beberapa kendala teknis seperti *error system* yang terjadi di dalamnya. Namun terlepas dari kendala teknis tersebut, pelaksanaan SIPD mampu membantu pemerintah kabupaten dapat mendapatkan opini WTPnya. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang semakin baik setiap tahunnya mendorong BPK untuk memberikan Opini terbaiknya kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Opini WTP ini menjadi acuan dorongan dan motivasi untuk selalu memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Penerapan SIPD dan Kualitas LKPD terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,415. Serta nilai $t_{hitung} (7,239) > t_{tabel} (1,997)$.
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar

0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,496. Serta nilai $t_{hitung} (7,558) > t_{tabel} (1,997)$.

3. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Nilai adjusted R² sebesar 0,628 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 62,8% atau dapat dikatakan 62,8% perubahan atas variabel Perolehan Opini BPK dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan SIPD dan Kualitas dari LKPD sedangkan sisanya 37,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan tenaga dimana wilayah populasi yang cukup luas sehingga dipersempit untuk diambil sampel saja, kemudian Penelitian ini mengacu kepada perolehan Opini BPK tahun 2020 dikarenakan pada bulan-bulan penelitian, BPK belum mengeluarkan Opini tahun 2021 kepada Kabupaten Purbalingga.

Arah Masa Depan Penelitian

peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut pada Opini BPK tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, dan untuk menambahkan variabel-variabel independen baru diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi Perolehan Opini Audit BPK di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan harus terus memaksimalkan penggunaan SIPD dari Kementerian Dalam Negeri ini, dengan melakukan berbagai cara seperti pelatihan kepada ASN yang bertanggungjawab dalam proses penginputan data-data dan dokumentasi serta terus aktif dalam melaporkan segala bentuk *Error System* yang terjadi sehingga proses pengelolaan keuangan tidak terganggu dan Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan terus melakukan peningkatan Kualitas dari Laporan Keuangan Daerah agar setiap tahunnya Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK dengan melakukan berbagai cara seperti :
 - a. Merekrut SDM pengelola keuangan yang berkualitas.
 - b. Melakukan peningkatan kinerja pengelola keuangan dalam rekonsiliasi data keuangan sehingga tercapainya ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.
 - c. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan melakukan bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi mengenai SPI dan SAP serta pengelolaan aset daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Benu, Prof. Fred L. dan Prof. Agus S. Benu. 2019. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF EKONOMI, SOSIOLOGI, KOMUNIKASI, ADMINISTRASI, PERTANIAN, DAN LAINNYA*. Prenada Media Group : Jakarta Timur.
- Creswel. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Enterprise, Jubile. 2018. *SPSS Komplet untuk Mahasiswa*. Kompas Gramedia : Yogyakarta
- Prehanto, Dedy Rahman, S.Kom.,M.Kom. 2020. *Konsep Sistem Informasi*. PT Scopindo Media Pustaka : Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia : Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat : Jakarta.

- Moenek, R. dan D. Suwanda. 2020. *Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- . 2019. *Mempertahankan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Penerbit PPM : Jakarta Pusat.
- S. Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta Bandung : Bandung.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 2012. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito Bandung : Bandung.
- Wiryanto. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grasindo : Jakarta.

2. Jurnal dan Artikel

- Dione, Frans dan Utami Faradina. 2020. “*Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development*”. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1061>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. “*Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)*.” <https://bangda.kemendagri.go.id/>.
- Nasution, Muhammad Irfan. 2021. “*PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN*” jurnal 9, no. 77. Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Zalni. 2021. “*Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntansi Akrual dan Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Kendari*” Jurnal Ekonomi Volume 9 Nomor 1. Politeknik Baubau.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaa Keuangan Negara.

4. Lain-Lain

<https://bpkad.pacitankab.go.id/percepatan-implementasi-sipd-sistem-informasi-pemerintahan-daerah/>. “Percepatan Implementasi SIPD.” Minggu, 5 September 2021

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

